

VOL. 19 . NO.1 MARET 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL 'ULA (STAIM)
NGLAWAK KERTOSONO NGANJUK

Vol. 19 No. 1 Maret 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL ‘ULA (STAIM)

NGLAWAK KERTOSONO NGANJUK

Vol. 19 No. 1 Maret 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi adalah jurnal yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Mitahul 'Ula (STAIM) Nganjuk. Terbit Pertama Kali tahun 2002.

Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun, yakni pada bulan maret dan september.

Kami mengundang para peneliti, akademisi dan pemerhati keilmuan untuk menyumbang artikel yang sesuai dengan standar ilmiah. Redaksi berhak melakukan revisi tanpa mengubah isi dan maksud tulisan. **Alamat Redaksi:** JL. KH. Abdul Fattah Nglawak Kertosono Nganjuk. Telp/Fax: (0358)552293; Email: staimlentera@gmail.com

Vol. 19 No. 1 Maret 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal
LENTERA
Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

Editorial Team

Editor-in-Chief	: Lulud Widjayanti	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
Managing Editors	: Aan Nasrullah	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
Editorial Board	: Moh. Sulhan,	(UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
	: Subandi	(IAIN Raden Intan Lampung)
	: Hujair AH. Sanaky	(UII Yogyakarta)
	: Muhammad Thoyib	(IAIN Ponorogo)
	: Nur Fajar Arif	(UNISMA Malang)
	: Ismail S. Wekke	(STAIN Sorong Papua)
Editors	: Rony Harsoyo	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: M. Mukhlisin	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: Nilna Fauza	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: M. Saini	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: Yuli Khoirul Umah	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
IT Support	: Aminul Wathon	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

CONTENTS

Samuel Charlies Mowoka <i>Islam Nusantara Dan Islam Di Nusantara: Perkembangan Islam Sejak Masuknya Sampai Kini</i>	1-16
Qoyimatul Mufidah, dkk <i>Ulama Perempuan Dalam Paradigma Fiqih Patriarkis</i>	17-25
Lalu Bagus Prihatin Pujasetiandi, Diswandi, Luluk Fadliyanti <i>Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Dalam Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah</i>	26-44
Alfi Ma'rifatun Nisa <i>Islam Dan Akulturasi Budaya Lokal Di Wonosobo (Studi Terhadap Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal di Desa Batur, Dieng, Wonosobo)</i>	45-53
Abdul Farid, Hailuddin, dan Wahyunadi <i>Analisis Determinan Kemiskinan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016</i>	54-68
Ana Choerunisak <i>Tradisi Rejeban Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Jawa Tengah</i>	69-74
Abdul Farid, Hailuddin, Wahyunadi <i>Analisis Determinan Kemiskinan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016</i>	75-90
Dhina Megayati <i>Konsep Perbuatan Cabul Dalam Kebijakan Hukum Pidana</i>	91-108
Zainul Hadi, Mansur Afifi, Taufiq Chaidir <i>Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Konvensional Dan Syariah Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode 2014.6-2019.12</i>	109-129

ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016

Oleh:

Abdul Farid¹, Hailuddin², Wahyunadi³

E-mail: opifarid@gmail.com

Abstract

Research entitled Analysis of Poverty determinant in West Nusa Tenggara province for the period of 2010-2016. The research aims to test the influence of: (1) health as indicated by life expectancy for poverty, (2) education is indicated by Length of school average on poverty, (3) investment indicated by the formation of gross fixed capital on poverty, (4) Degree of Fiscal Autonomy towards poverty. So, refers to this aims the government of West Nusa Tenggara province can find out what interventions can be performed toward variables observed to decrease poverty rate. Research method using descriptive analysis with secondary data taken from sources that have legality in issued development data. so we can take quantitative approach to know how much influence of variable observed toward poverty in West Nusa Tenggara Province period of 2010-2016.

Keywords: *Poverty, Education Degree, Health Degree, Investment and Fiscal Independence Degree.*

A. Pendahuluan

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan besar dan mendasar yang dihadapi oleh berbagai negara didunia, isu kemiskinan tidak jarang menjadi agenda kerja dari negara yang memiliki persoalan tentang rendahnya taraf hidup masyarakat yang sebagai akibat dari kondisi nasional dan situasi global yang berpengaruh didalam negara tersebut. Suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (lebih dari 2 persen per tahun), sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan. Ciri-ciri tersebut terlihat pada beberapa negara yang memiliki permasalahan kemiskinan termasuk indonesia⁴.

¹ Mahasiswa Pasca Sarjana UNRAM, Indonesia

² Dosen Program Magister Ilmu Ekonomi UNRAM, Indonesia

³ Dosen Program Magister Ilmu ekonomi UNRAM, Indonesia

⁴ Munir, Badrul. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Bappeda Provinsi NTB. Jakarta

Dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut, padahal setiap mereka yang memimpin Negara Indonesia selalu membawa kemiskinan sebagai misi utama mereka disamping misi-misi yang lain.

Konsentrasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengentasan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program pengentasan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi pengentasan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Permasalahan masih tingginya jumlah penduduk miskin dari tahun ketahun menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai pengayom kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk mencari jalan keluar dalam upaya pengentasan penduduk miskin.

Kinerja pemerintah Provinsi NTB melawan kemiskinan terlihat dari kinerja penanggulangan kemiskinan mencapai titik yang membanggakan. Pada September 2015 yang lalu, NTB mencapai prestasi yang membanggakan dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)⁵ sebagai salah satu yang progresif di kawasan Asia. Merujuk data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sejak 2006 hingga 2016 penurunan kemiskinan di NTB rata-rata 0,56 persen tiap tahunnya. Tercepat ketiga setelah Maluku (0,61 persen) dan Papua (0,57). Bahkan pada periode pertama Gubernur Dr. Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) memimpin NTB (2009-2013), akumulasi penurunnya 1,3 persen pertahun. Persentase penduduk miskin NTB menurun 7,38 persen selama periode 2008-2016. Yaitu dari 23,40 persen pada 2008 menjadi 16,02 pada 2016 penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi. Jika pada 2010 tercatat lebih dari satu juta jiwa penduduk miskin, maka pada Maret 2017 menyusut menjadi 793 ribu jiwa.

Selama dalam kurun waktu tersebut, Beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB antara lain; NTB Bumi Sejuta Sapi (NTB BSS) dan program percepatan pengembangan komoditas unggulan Sapi, Jagung, Rumput Laut (PIJAR). Ada program pula Kampung Media berbasis komunitas

⁵ Tujuan Pembangunan Milenium adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.

masyarakat desa yang meraih penghargaan Top Inovasi Nasional 2014 dan mewakili Indonesia dalam kompetisi top inovasi dunia. Ada juga Program percepatan peningkatan pelayanan dasar di desa, yaitu program ADONO (Angka Droup Out menuju Nol) (ADONO), ABSANO (Angka Buta Aksara menuju Nol) dan AKINO (Angka Kematian Ibu menuju Nol) dan masih banyak lagi program lain yang bersinergi dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Kemiskinan di Provinsi NTB tidak hanya bisa kita lihat dari sisi Penduduk miskin di Provinsi NTB masih didominasi oleh penduduk di pedesaan. Terdapat perubahan struktural dari struktur penduduk miskin di NTB. Pada tahun 2012, penduduk miskin di Provinsi NTB lebih banyak terdapat di perkotaan. Pada tahun 2015, kondisinya terbalik dimana penduduk miskin lebih banyak terdapat pada pedesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi perkotaan lebih baik dibandingkan dengan pedesaan, yang berdampak pada peningkatan daya beli yang lebih baik pada masyarakat perkotaan. Dilihat secara spasial per Kab/Kota di NTB, lebih dari 50% penduduk miskin NTB terkonsentrasi di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Kondisi tersebut sejalan dengan indikator pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten dimaksud yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten yang lain. Masing-masing Kab/Kota memiliki target penurunan kemiskinan, yang telah disepakati bersama untuk mendukung target penurunan kemiskinan Provinsi NTB.

Potret kemiskinan di NTB (Tabel 1) menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tetap memperlihatkan penurunan jumlah setiap tahunnya, meskipun secara detail kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di NTB tidak selalu menurun di setiap tahunnya, sebagai contoh di Kabupaten Bima pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin sebanyak 73.634 jiwa, namun pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 73.832 jiwa, namun setelah tahun tersebut terlihat penurunan sampai menyentuh angka 72.360 jiwa pada tahun 2016.

Tabel 1. Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi NTB

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Lombok Barat	129.794	121.235	112.188	110.986	110.745	113.300	110.850
Kabupaten Lombok Tengah	171.414	158.925	148.153	145.151	145.177	147.940	145.370
Kabupaten Lombok Timur	263.691	243.990	227.859	219.559	219.665	222.190	16.180
Kabupaten	90.453	83.903	78.208	73.786	73.858	73.570	71.660

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sumbawa							
Kabupaten Dompu	43.665	40.787	37.830	36.397	36.421	35.940	34.310
Kabupaten Bima	85.250	79.124	73.634	73.832	74.540	73.710	72.360
Kabupaten Sumbawa Barat	25.140	23.815	21.724	21.710	22.039	22.500	22.470
Kabupaten Lombok Utara	86.339	80.035	74.155	72.157	72.192	72.280	71.020
Kota Mataram	58.272	54.793	50.478	46.674	46.673	46.760	44.810
Kota Bima	18.304	17.215	15.878	15.249	15.312	15.700	15.420
Nusa Tenggara Barat	972.321	904.424	840.108	815.501	816.621	823.890	804.450
Persentase	21,55	19,73	18,63	17,97	17,24	17,10	16,48

Sumber: BPS Prov. NTB 2018

1. Keterkaitan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan⁶. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (human capital) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, kalau kita melihat dari data rilis BPS Prov NTB, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 6,79 tahun, meningkat 0,08

⁶ Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga, 2004. Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium.

tahun dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini memperlihatkan rata-rata tingkat pendidikan kita setara dengan kelas VII SLTP yang dimana masih tergolong rendah.

2. Keterkaitan Derajat Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi, sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas.

Mils dan Gilson (1990) dalam Dimas (2010) mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan.
- b. Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
- c. Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan.
- d. Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya.
- e. Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

Intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan⁷. Maka, pembangunan kesehatan merupakan pembangunan yang dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Untuk Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. AHH diartikan sebagai umur yang mungkin

⁷ Arsyad, L. 2016. Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima. STIE YKPN. Yogyakarta.

dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. AHH dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH), yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP). Sehingga hubungan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan salah satunya dapat kita lihat pada Angka Harapan Hidup (AHH) yang dimana merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi.

Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Di NTB sendiri Angka Harapan Hidup (AHH) terbilang cukup baik yaitu 65,81. Namun peningkatan usia harapan hidup tidak hanya soal umur panjang, tetapi juga soal hidup sehat dan produktivitas.

3. Keterkaitan Investasi terhadap Kemiskinan

Investasi Fisik atau PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain). Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa didalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (Consumption of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi

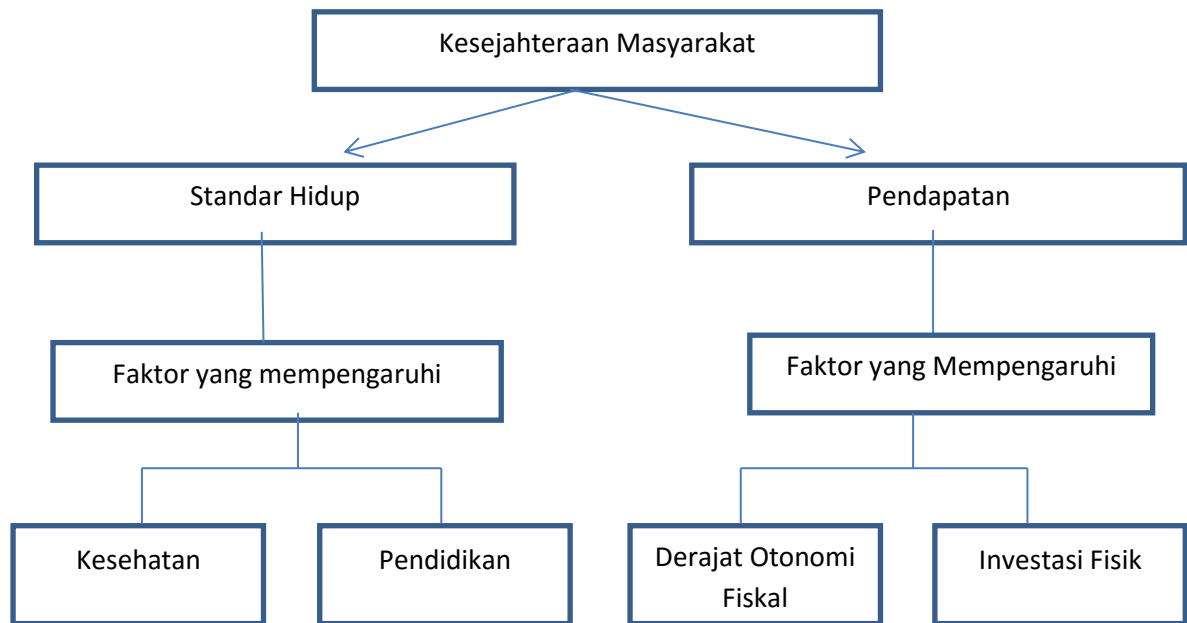
secara normal selama satu periode⁸. Investasi fisik adalah salah satu komponen penting dari permintaan agregat yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. variabel yang digunakan adalah Pembentukan Modal Kotor, yang didefinisikan sebagai peningkatan tahunan dalam stok modal (K). Peningkatan investasi dalam daerah diharapkan akan mengurangi tingkat kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja.

4. Keterkaitan Derajat Otonomi Fiskal/Keuangan Terhadap Kemiskinan

Adanya desentralisasi fiskal diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah dan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah dicerminkan dengan perbandingan besarnya PAD terhadap total pendapatan daerah. Sejak 14 tahun dilaksanakannya otonomi daerah sesuai UU No 32 Tahun 2004, pada banyak hasil penelitian menunjukkan kemandirian keuangan daerah mempunyai hubungan yang signifikan, kuat, dan tidak searah dengan pengangguran dan kemiskinan. Sehingga hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi nya kemandirian fiskal di suatu daerah, maka semakin rendah kemiskinan yang ada pada daerah tersebut. Adapun Peningkatan kemandirian keuangan daerah guna mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dilakukan dengan cara menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama pendapatan keuangan daerahnya, sehingga nantinya akan dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan rakyat. Dari data yang dirilis BI melalui dokumen Kerangka Ekonomi dan Keuangan Regional tahun 2016, Provinsi NTB memiliki rasio kemandirian pada triwulan II 2016 sebesar 29,93%, atau lebih tinggi dibanding Kota/Kabupaten di Provinsi NTB yang hanya sebesar 7,46%. Rasio kemandirian Provinsi NTB tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 23,85%. Peningkatan rasio kemandirian Provinsi NTB tersebut terkait peningkatan PAD dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama peningkatan pajak daerah. Kota Mataram pada triwulan II 2016 mempunyai rasio kemandirian yang tertinggi di antara Kota/Kabupaten di Provinsi NTB, yaitu sebesar 18,98%. Hal ini menandakan Kota Mataram memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam menghasilkan pendapatan yang bersumber dari daerahnya sendiri dibandingkan Kota/Kabupaten lainnya. Kota Mataram berhasil membukukan PAD sebesar Rp123,43 miliar pada triwulan II 2016. PAD tersebut merupakan terbesar di antara Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi NTB.

⁸ Badan Pusat Statistik. 2018. Diakses pada Desember 14, 2019
<https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html>

Dari uraian diatas dapat dipetakan kerangka permasalahan kemiskinan di provinsi NTB adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu jenis penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Adapun lokasi penelitian ini berada di provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dengan melihat masing-masing tingkat kemiskinan yang terjadi di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi NTB karena dianggap paling berperan penting dalam penanganan permasalahan kesejahteraan masyarakat di provinsi NTB.

B. Pembahasan

1. Penentuan Model Estimasi Data Panel

Dalam menentukan model estimasi yang dapat digunakan untuk penelitian ini, pertama-tama kita akan melakukan uji chow yang dimana bertujuan untuk mengetahui apakah model yang digunakan common effect ataukah fixed effect Model yang dipilih. Hipotesa yang digunakan adalah sebagai berikut: Jika probabilitas cross-section Chi Square atau p-value yang diperoleh kurang dari 0.05 atau maka yang dipilih adalah Fixed Effect daripada Common Effect model, dan sebaliknya apabila nilainya lebih dari 0,05 maka kita akan memilih Common Effect Model. Dari hasil regresi diperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effect Test	Chi-Sq. Statistik	Chi-Sq. d.f	Prob.
1	2	3	4
Cross-section chi square	233.841059	9	0.0000

Catatan: Tolak H_0 jika $p\text{-value} < 0,05$; jika tidak, terima H_0 .

Berdasarkan hasil uji Chow yang dilakukan, diketahui bahwa nilai probabilitas Cross-section chi square adalah sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga disimpulkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model.

Setelah pengujian pertama dilakukan, selanjutnya dilakukan pengujian tahap kedua yaitu uji Hausman. Uji Hausman bertujuan untuk mengetahui apakah Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM) yang dipilih. Hipotesa yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Random Effect Model

H_a : Fixed Effect Model

Jika probabilitas Chi Square yang diperoleh kurang dari 0.05 maka H_0 ditolak, sehingga model yang lebih sesuai untuk digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Sebaliknya, apabila H_a ditolak, maka model yang sebaiknya digunakan adalah Random Effect Model (REM). Dari hasil regresi diperoleh berdasarkan Metode Fixed Effect model diperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Tes Summary	Chi-Sq. Statistik	Chi-Sq. d.f	Prob.
1	2	3	4
Cross-section random	6.081012	4	0.1932

Catatan: Tolak H_0 jika $p\text{-value} < \text{tingkat signifikansi } 1\%, 5\%, 10\%$; jika tidak, terima H_0 .

Berdasarkan hasil **uji Hausman** yang dilakukan, diketahui bahwa nilai probabilitas *Cross-section random* adalah sebesar 0.1932 lebih besar dari alpha 0,05 sehingga disimpulkan bahwa H_0 diterima dan model terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

Kemudian kita lanjutkan dengan uji lagrangian multiplier untuk menentukan apakah kita tetap memilih Random Effect ataukah Common Effect Model. Hipotesa yang digunakan adalah jika pada uji lagrange multiplier didapat nilai $p\text{-value}$ kurang dari 0,05 maka metode estimasi terbaik adalah Random Effect Model, sebaliknya apabila $p\text{-value}$ lebih besar dari 0,05 maka metode estimasi terbaik adalah Common Effect Model. Dari hasil regresi diperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Lagrangian Multiplier

Effect Test	Cross Section	Time	Booth
1	2	3	4
Lagrange Multiplier Test (Breusch-Pagan)	144.8273 (0,0000)	2.504198 (0,0000)	147.3315 (0,0000)

Catatan: Tolak H_0 jika p-value < 0,05; jika tidak, terima H_0 .

Berdasarkan hasil uji Lagrangian Multiplier yang dilakukan, diketahui bahwa nilai p-value yang ditunjukkan oleh angka dalam kurung yaitu sebesar 0,0000 dimana hasilnya kurang dari 0,05 (p-value < 0,05) dengan kata lain H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti metode estimasi terbaik adalah *Random Effect*, sehingga dalam pengujian ini, metode yang paling tepat digunakan adalah Random Effect Model.

2. Uji Signifikansi

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi atau *Goodness of fit* digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien Determinasi (R^2) memiliki kelemahan mendasar yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R^2). R^2 memiliki dua sifat (Gujarati, 2003), diantaranya, pertama, R^2 merupakan besaran non negatif; dan kedua, besarnya adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika R^2 sebesar 1 berarti suatu kecocokan sempurna, sedangkan R^2 yang bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

R Squared	0.818361
Adjusted R Squared	0.807183

Sumber: Output pengolahan data

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai adjusted R-squared sebesar 0.807183. Hal ini berarti bahwa 80,71 persen tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dijelaskan oleh variabel Usia Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Investasi dan Derajat Otonomi Fiskal. Sedangkan sisanya 19,29 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

b. Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dari hasil regresi pengaruh Usia Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Investasi dan Derajat Otonomi Fiskal terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2016 diperoleh nilai F-hitung sebesar

73.21313 dengan nilai probabilitas F (prob F-statistic) sebesar $0.000000 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (Usia Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Investasi dan Derajat Otonomi Fiskal) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (tingkat kemiskinan).

c. Uji t

Uji t atau uji parsial dilakukan untuk menguji apakah variabel independen (Usia Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Investasi dan Derajat Otonomi Fiskal) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (tingkat kemiskinan).

Tabel 6. Hasil Estimasi Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	110.9099	12.51548	8.861812	0.0000
AHH	-1.030500	0.210883	-4.886596	0.0000
RLS	-3.028789	0.597769	-5.066825	0.0000
DOF	-0.053685	0.042051	-1.276673	0.2063
INVESTASI	-0.108994	0.020518	-5.312107	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			4.817561	0.9707
Idiosyncratic random			0.836687	0.0293
Weighted Statistics				
R-squared	0.818361	Mean dependent var		1.209766
Adjusted R-squared	0.807183	S.D. dependent var		1.941125
S.E. of regression	0.852366	Sum squared resid		47.22430
F-statistic	73.21313	Durbin-Watson stat		0.712113
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.455923	Mean dependent var		18.46920
Sum squared resid	1828.287	Durbin-Watson stat		0.018394

Sumber: Hasil Data Oleh (Eviews 9)

Berdasarkan hasil Uji t menunjukkan bahwa secara individu, terdapat tiga variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen. Variabel tersebut adalah Rata-Rata Lama Sekolah dan Investasi, dan angka harapan hidup. Sedangkan variabel Derajat Otonomi Fiskal tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3. Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat kesehatan yang diukur dengan Angka Harapan Hidup memiliki hubungan yang negatif dan

berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi NTB, hal ini terlihat dari variabel Angka Harapan Hidup memiliki t-hitung sebesar -4.886596 dengan probabilitas sebesar $0.000 < 0.05$, dan koefisien sebesar -1.030500 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Angka Harapan Hidup berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTB. Sehingga semakin tinggi Angka Harapan Hidup suatu daerah, maka derajat kesehatan daerah tersebut meningkat. Dengan penduduk yang sehat maka produktivitas akan meningkat pula. Meningkatnya produktivitas penduduk akan meningkatkan pendapatan sehingga kesejahteraan di wilayah tersebut juga meningkat.

4. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan.

Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa variabel Rata-Rata Lama Sekolah memiliki t-hitung sebesar -5.066825 dengan probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$, dengan koefisien sebesar -3.028789 artinya dalam setiap penambahan angka rata-rata lama sekolah setiap tahunnya, dapat menurunkan kemiskinan sebesar -3,02 persen. sehingga apabila kita melihat dari nilai coefficient keseluruhan variabel, dapat disimpulkan bahwa variabel Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTB. Perhitungan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Arsyad (2016) mengatakan bahwa pendidikan (baik formal maupun non formal) dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung, yaitu melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung, yaitu melalui pelatihan golongan miskin dengan bekal ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

5. Pengaruh Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan

Investasi Fisik atau PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk

barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain). Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa didalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (Consumption of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel investasi memiliki hubungan negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTB. Hal ini terlihat dari hasil analisis variabel Investasi memiliki t-hitung sebesar -5.312107 dengan probabilitas sebesar $0.000 < 0.05$ dengan koefisien sebesar -0.108994, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel investasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTB.

6. Pengaruh Derajat Otonomi Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa variabel Derajat Otonomi Fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTB. Hal ini terlihat dari nilai probability sebesar 0.2479 yang lebih besar dari 0,05 dengan koefisien sebesar -0.053685. Berdasarkan hasil pengujian tersebut kenaikan Derajat Otonomi Fiskal yang diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin dapat terjadi apabila peningkatan pengeluaran pemerintah yang dilakukan bukanlah pengeluaran yang bersifat *pro-poor*⁹ sehingga tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Selain itu juga kemandirian keuangan masih menjadi permasalahan oleh banyak pemerintah daerah, tidak terkecuali kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menjadi sumber penerimaan daerah yang utama, Pemerintah NTB masih sangat tergantung kepada dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Daerah yang memiliki kemandirian daerah tercermin dari persentase PAD yang tinggi terhadap pendapatan daerah, artinya porsi PAD terhadap pendapatan daerah pun tinggi. Dengan meningkatnya kemandirian fiskal akan memberikan diskresi bagi pemerintah daerah Provinsi NTB untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan.

⁹ Pro-poor merupakan kebijakan sosial pemerintah yang berpihak kepada masyarakat kecil atau orang miskin. Portal-Ilmu.com. Konsep Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan di Indonesia. Diakses pada Desember 14, 2019 <https://portal-ilmu.com/konsep-pertumbuhan-ekonomi-berkeadilan-di-indonesia/>

C. Penutup

Analisis data panel dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Usia Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Investasi dan Derajat Otonomi Fiskal terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2017. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan model *Random Effect* diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$K_{it} = 110,9099 - 1,0305 AHH_{it} - 3,0287 RLS_{it} - 0,0536 DOF_{it} - 0,1089 INV_{it}$$

Keterangan:

K	= Kemiskinan
RLS	=Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
AHH	=Angka harapan Hidup (AHH)
INV	=Investasi
DOF	=Desentralisasi Otonomi Fiskal

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi variabel Angka Harapan Hidup sebesar -1.0305 berarti bahwa setiap peningkatan AHH sebesar 1 persen, maka dapat menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,03 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Pada variabel Rata-rata lama sekolah diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -3.02 berarti bahwa setiap peningkatan variabel Rata-Rata Lama sekolah selama satu tahun maka dapat menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 3.02 persen, dan untuk nilai koefisien variabel investasi didapat nilai koefisien sebesar -0.108 yang berarti bahwa setiap peningkatan investasi Fisik sebesar 1 persen, maka dapat menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.10 persen. Dan yang terakhir nilai koefisien variabel Derajat Otonomi Fiskal sebesar -0.053 memperlihatkan bahwa setiap peningkatan Derajat Otonomi Fiskal sebesar 1 persen, maka dapat menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.053 persen.

Dari pembahasan diatas dapat kita simpulkan dalam upaya mengurangi jumlah kemiskinan di Provinsi NTB, pemerintah hendaknya dapat memfokuskan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dasar sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga yang dapat diharapkan adalah semakin tingginya kualitas sumber daya manusia maka diharapkan mengurangi jumlah penduduk miskin. Beberapa aksi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui upaya-upaya positif seperti peningkatan fasilitas sarana prasarana, advokasi, dan peningkatan tenaga-tenaga berkompeten di bidang pendidikan dan kesehatan serta melakukan pembenahan regulasi terkait dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia di Provinsi NTB . Selain itu juga, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi

mengenai pemecahan dan solusi terbaik melalui penyamaan visi misi, mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada di masing-masing daerah dan tidak lupa pemerintah daerah Provinsi NTB dapat berkoordinasi dengan seluruh pemangku kebijakan di seluruh Pulau NTB serta lintas sektor terkait agar dapat melakukan inovasi-inovasi atau terobosan cepat yang diharapkan akan berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi NTB.

Daftar Pustaka

- Arsyad, L. 2016. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Data IPM Nusa Tenggara Barat 2010-2016*. Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Data dan Informasi Kemiskinan Nusa Tenggara Barat 2010-2016*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. *PDRB Nusa Tenggara Barat 2010-2016*. Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat.
- Bank Indonesia. 2016. *Kajian ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati & Porter. 2009. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta. Salemba Empat
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Bappeda Provinsi NTB. Jakarta
- Permana, Anggit Yoga & Arianti, Fitri. 2012. *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009*.
- Portal-Ilmu.com. *Konsep Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan di Indonesia*. Diakses pada Desember 14, 2019 <https://portal-ilmu.com/konsep-pertumbuhan-ekonomi-berkeadilan-di-indonesia>.
- Prastyo, Adit Agus. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*, Semarang: UNDIPRESS.
- Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga, 2004. *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium*.
- Rizky Yanuar Saputra. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Enam Kabupaten/Kota Sekaresidenan Madiun Tahun 2010-2015*, Surakarta.
- Sudarlan. 2015. *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Dan Kemiskinan Di Indonesia*. JURNAL EKSIS Vol.11 No.1 , April 2015: 3036 – 3213.
- Sukirno, S. 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar*: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Rajawali Pers. Jakarta
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Widarjono, A. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Ekonisia. Yogyakarta